



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ABDULLAH SANI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**
3. NHK : **183174**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.295.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
3. Tanah Seluas 238 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/196 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>927.500.000</b>
1. MOTOR, Honda Scoopy Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>79.400.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>12.339.500</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.314.239.500
III. HUTANG	Rp.	649.806.913
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.664.432.587

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.